

PENDIDIKAN KETRAMPILAN HIDUP

Telaah Filosofis atas *Life Skill Curriculum*

Anita Lie

Universitas Widya Mandala, Edu Business Consulting, Surabaya

Abstract:

What is life skill education? Why is its curriculum needed? How can life skill education be implemented into practical strategy of learning in our school? These are the fundamental questions that guide the developing thought of this article. To the extent of practical strategy that system of education should bring up students to be masters of their life, life skill education might be worth. Indonesia needs such a model of education. Yet, as one may guess easily, the mentality of Indonesian society is probably the huge challenge to cope when implementing this model. Life skill model of education needs a new perspective of “life”, not just that of “skill.” The article deals with philosophically some systems of life skill curriculum and its actual challenges. In order to transform such a model of education into an apt program in the context of Indonesia, we should be aware of the very close relationship between “being skillful” and “life context” in our system of education.

Keywords: pendidikan, keterampilan hidup, kurikulum, pembelajaran.

Akhir-akhir ini pendidikan ketrampilan hidup marak dibicarakan baik dalam wacana para pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan maupun di media massa. Makalah ini akan membahas apa itu pendidikan ketrampilan hidup, mengapa kurikulum ketrampilan hidup dibutuhkan, dan bagaimana strategi pembelajaran yang disarankan. Selanjutnya, makalah ini akan meninjau kurikulum ketrampilan hidup dalam kerangka teoritis aliran-aliran kurikulum seperti yang pernah dibuat oleh Allan Glatthorn.

1. Apa dan Mengapa?

Ketrampilan hidup sangat berpengaruh pada kesuksesan seseorang dalam pekerjaan dan hidup. Ketrampilan hidup mencakup pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berfungsi secara mandiri (Brolin, 1989). Ketika seseorang mempertimbangkan ketrampilan untuk mempertahankan pekerjaan, ketrampilan hidup sama pentingnya dengan ketrampilan kerja. Sebelum berangkat bekerja, orang harus mengenakan pakaian, makan pagi, dan memastikan transportasi apa yang dipakai. Di tempat pekerjaan, dia butuh berinteraksi dengan tepat dengan rekan-rekan kerja dan atasan, mengatasi permasalahan dengan benar, dan sebagainya. Di kantor-kantor modern, gaji dan imbalan tidak lagi diberikan dalam

bentuk tunai melainkan lewat cek, BG atau transfer bank sehingga dia juga harus memahami urusan keuangan dalam konteks ini. Kemudian dia juga perlu ketrampilan mengelola keuangannya dengan bijak termasuk penggunaan kartu kredit dan debit. Kekurangan serius dalam ketrampilan ini bisa berakibat pada kehilangan pekerjaan atau kalau di luar negeri, bisa dimasukkannya pelanggar pada pusat rehabilitasi masyarakat. Tanpa sumber daya untuk mengajarkan ketrampilan hidup, pelatihan-pelatihan pekerjaan akan merupakan usaha yang sia-sia.

Untuk membantu orang berfungsi dengan baik dalam kehidupan, beberapa institusi sudah mengembangkan kurikulum ketrampilan hidup. Konsep ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada mulanya, pendidikan ketrampilan hidup ini disusun untuk membantu orang-orang yang mempunyai kesulitan-kesulitan belajar atau masuk dalam kategori ketergantungan pada obat-obatan, retardasi mental dan kelainan fisik. Agar bisa hidup dan berfungsi dengan mandiri dalam masyarakat, orang-orang ini perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus seperti misalnya belajar mengemudi, mendapatkan surat ijin mengemudi, melakukan urusan-urusan di bank dan kantor pajak, mencari tempat penitipan anak yang cocok. Kemudian selanjutnya, pendidikan ketrampilan hidup dikembangkan lagi untuk populasi umum karena perubahan zaman yang begitu cepat dan drastis dianggap telah menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan hidup sehingga orang-orang pada umumnya pun perlu belajar bagaimana bisa hidup sehari-sehari dengan baik. Kurikulum ketrampilan hidup ini kadang-kadang juga dikenal sebagai pendidikan berdasarkan kompetensi. Biasanya kurikulum ketrampilan hidup mencakup area ketrampilan sosial, manajemen keuangan, pekerjaan dan kesehatan. Dalam kurikulum ketrampilan hidup ini, pembelajar belajar bukan saja pengetahuan umum melainkan ketrampilan yang bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, misalnya membuka rekening di bank.

Brolin, D. E. (1989) dalam bukunya *Life Centered Career Education: A Competency Based Approach* (3rd ed.) membagi ketrampilan hidup menjadi ketrampilan sosialisasi, pengambilan keputusan, pekerjaan, manajemen keuangan, transportasi, kesehatan, tanggung jawab keluarga, pemahaman hukum, dan bertelepon. Kemudian beberapa pakar lain lebih lanjut menambahkan ketrampilan melaksanakan suatu perjalanan (*traveling skills*), bertahan hidup di tempat asing (*survival skills*), belajar seumur hidup (*life-long learning skills*), menggunakan internet (*internet skills*).

Ketrampilan sosialisasi mencakup ketrampilan berkomunikasi, manajemen emosi, dan resolusi konflik. Sebagai tambahan, pelajaran-pelajaran didesain untuk membantu pembelajar menjadi orang yang kompeten secara sosial. Ketrampilan membuat keputusan singkat tapi penting. Ketrampilan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan adalah ketrampilan paling penting yang harus dikembangkan seseorang. Mempunyai ketrampilan ini akan bisa membantu mengatasi kekurangan-kekurangan di bidang lain. Contoh sederhana, seseorang mungkin tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di suatu tempat di luar kota, tetapi kemampuan menyelesaikan masalah akan membantu dia mencari tahu siapa yang bisa dia tanyai dan mintai informasi.

Ketrampilan pekerjaan mencakup banyak macam ketrampilan teknis. Secara umum, ketrampilan untuk mengatur waktu dengan bijak, memahami prosedur standar

dan norma-norma selama hari-hari pertama di tempat pekerjaan akan sangat membantu. Selain itu, harapan-harapan umum pemilik perusahaan dalam hal keamanan, produktivitas, sikap, dan perilaku juga perlu diketahui pegawai baru. Akhirnya, ketrampilan untuk beradaptasi menghadapi perubahan-perubahan juga sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam pekerjaan.

Pengelolaan keuangan memerlukan ketrampilan yang sedikit lebih kompleks. Manajemen keuangan secara standar meliputi pemahaman keuntungan pekerjaan, anggaran, menggunakan jasa bank dan kredit, menghindari atau memanfaatkan hutang. Ketrampilan ini menjadi lebih relevan pada jaman ini karena perubahan yang begitu pesat telah melanda dunia perekonomian dan teknologi informasi. Jika beberapa tahun lalu, mengelola uang cukup sederhana dengan kegiatan mengatur pemasukan dan pengeluaran serta tabungan, kini kegiatan keuangan menjadi lebih rumit dan kompleks dengan adanya sarana internet dan fund-management.

Transportasi meliputi banyak ketrampilan praktis mulai dari mencari kendaraan umum yang dibutuhkan sampai dengan membeli dan merawat kendaraan. Pengelolaan kesehatan memberikan pelatihan dalam menjaga gaya hidup yang sehat. Ada banyak informasi mengenai hidup sehat. Topik-topik meliputi kebugaran, gizi, obat dan alcohol yang berhubungan dengan pekerjaan, mengakses dan menggunakan pelayanan kesehatan dengan tepat. Tanggung jawab keluarga adalah ketrampilan menggunakan informasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti pengasuhan anak, keseimbangan antara kerja keluarga, dan perawatan anggota keluarga yang tua, sakit atau cacat. Pemahaman hukum adalah ketrampilan yang mencakup informasi bahwa banyak siswa perlu tahu bagaimana agar tidak terperosok dalam kasus-kasus pelanggaran hukum dalam pekerjaan dan masyarakat. Siswa juga perlu belajar mengenai upaya-upaya advokasi hukum dan pelayanan penasehat hukum. Ketrampilan menggunakan telpon meliputi mencari nomor telpon yang dibutuhkan, mencari informasi lewat telpon, tata krama pembicaraan melalui telpon. Ketrampilan ini juga menyangkut melakukan hubungan telpon jarak jauh. Sehubungan dengan pemakaian internet yang makin merambah, siswa juga perlu mempunyai ketrampilan mencari informasi lewat internet dan aturan main yang mendasar di dunia internet.

2. Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Ketrampilan Hidup

Dalam kurikulum yang disusun untuk mengajarkan ketrampilan hidup, pelatih atau guru seharusnya menggunakan prinsip-prinsip dasar pelatihan perilaku untuk mengajarkan ketrampilan. Pertama-tama, pelatih memberikan instruksi. Selama pemberian instruksi ini, pelatih memberikan informasi, memberitahu bagaimana melakukan sesuatu dan menyediakan contoh-contoh.

Kemudian, pelatih melakukan sendiri ketrampilan tersebut sebagai contoh. Ini bisa dilakukan dengan main peran. Main peran adalah dramatisasi dimana pembelajar melatih perilaku tertentu di bawah kondisi yang semirip mungkin dengan kondisi di dunia nyata. Contohnya mungkin dua orang diminta untuk duduk dan ber-

bicara sementara seorang yang lain melatih ketrampilan mendengarkan. Atau mungkin seseorang menilpun stasiun bis untuk mendapatkan informasi jadwal bis atau main peran seseorang yang berlatih menarik napas panjang ketika seseorang sedang memarahinya.

Langkah ketiga adalah pembelajar mengulang ketrampilan tersebut seperti yang sudah dicontohkan oleh pelatih. Pengulangan ini paling sulit karena kebanyakan orang merasa tidak nyaman berbicara di depan orang banyak. Karena, langkah ini sangat penting untuk mengembangkan rasa percaya diri sebagai bekal untuk menghadapi situasi sebenarnya. Makanya, pelatih perlu menunjukkan entusiasme dan upaya untuk membuat main peran ini menyenangkan. Pada tahap ini, pelatih bisa memberi masukan yang konstruktif atas proses main peran tersebut.

Selanjutnya, pembelajar perlu dibawa pada situasi yang sebenarnya untuk melatih ketrampilan yang baru ini. Seperti kata John Dewey, kurikulum yang paling efektif adalah *learning by doing*. Misalnya, pembelajar perlu diberi kesempatan untuk membuka buku tabungan sendiri di bank, melakukan transfer dana (tunai atau cek) dsb. Metode yang paling cocok digunakan untuk pengajaran ketrampilan hidup adalah main peran, modelling dan cooperative learning (Metode dan Teknik-teknik Cooperative Learning bisa dibaca di buku *Cooperative Learning*, Anita Lie, Gramedia Widiasarana, 2002).

3. Tantangan-tantangan dalam Pendidikan Ketrampilan Hidup

Tantangan dalam implementasi pendidikan ketrampilan hidup adalah konteks sosiokultural Indonesia yang mungkin berbeda dengan negara asal yang melahirkan kurikulum ketrampilan hidup yang mungkin diadopsi atau diambil sebagiannya. Sebagai contoh, beberapa topik yang dipakai Brolin dalam kurikulum ketrampilan hidupnya seperti pengelolaan keuangan, kesehatan, dan transportasi tidak akan sesuai dengan konteks Indonesia karena sistim perbankan, pelayanan kesehatan dan transportasi yang berbeda. Sementara itu ketrampilan mencari informasi tentunya melalui proses yang berbeda dalam konteks budaya di Indonesia yang masih kental dengan tradisi lisan dan belum mantap dengan tradisi baca-tulis dibanding di Amerika Serikat atau beberapa negara lain.

Tantangan lain bisa kita soroti dalam konteks aliran-aliran kurikulum. Alan Glatthorn (1987)¹ membagi aliran dan arah kurikulum menjadi 6: keilmuan akademis, fungsionalisme progresif, konformisme developmentalis, strukturalisme ilmiah, radikalisme romantis, dan konservatisme privatistik. Glatthorn mengemukakan demarkasi aliran kurikulum ini berdasarkan analisisnya terhadap 100 tahun

1 Kerangka Glatthorn dipakai dalam tulisan ini untuk memahami ritme dan arah perubahan suatu masyarakat (terutama sektor pendidikannya) serta menganalisis dan mengkritisi pendidikan ketrampilan hidup yang akhir-akhir ini marak dibicarakan.

perkembangan kurikulum di Amerika Serikat mulai dari 1890 sampai dengan masa pemerintahan Ronald Reagan. Keenam aliran kurikulum itu memang telah mempengaruhi pendidikan Amerika dan demarkasi ini dimaksudkan hanya sebagai suatu cara memahami teori dan praktik kurikulum dalam satu abad terakhir di Amerika Serikat. Kurikulum yang menekankan **keilmuan-akademis** meletakkan pengembangan kegiatan-kegiatan mental (berpikir) berdasarkan disiplin ilmu sebagai fungsi utama sekolah. Dengan kata lain, fokus kurikulum adalah ilmu pengetahuan. Ideologi keilmuan-akademis ini mendominasi pendidikan di Amerika Serikat pasca Perang Saudara Utara-Selatan ketika bangsa Amerika mulai menyadari peranan sekolah sebagai agen reformasi sosial.²

Pada masa ini, Presiden Harvard University Charles Eliot mengajukan rekomendasi-rekomendasi spesifik untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang sebagian masih banyak dipakai hingga saat ini. Diantaranya adalah pengurangan porsi aritmatika untuk pengenalan geometri, aljabar dan bahasa asing pada jenjang yang lebih rendah. Pada era ini pula, Stanley Hall (1894) mengetengahkan paradigma pendidikan yang berfokus pada anak. Anak didik merupakan subyek yang utama dalam pendidikan dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai obyek didik yang terus disuapi dengan makanan pengetahuan yang telah diolah dan dimasak oleh guru. Namun gagasan-gagasan Hall ini tidak tertuang dalam praktik-praktik pendidikan era keilmuan-akademis karena Hall sendiri sebagai seorang Darwinis sosial lebih mempercayai perubahan sosial yang evolusioner daripada transformasi radikal. Tugas utama sekolah menurut Hall adalah mendukung perubahan gradual ini melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk anak-anak berbakat.

Fungsionalisme progresif banyak dipengaruhi oleh dua pandangan yang sangat berseberangan yakni: orientasi progresif pada anak didik sebagai pusat pembelajaran oleh John Dewey dan pengikutnya dan orientasi fungsional oleh para pakar kurikulum. Kedua pandangan yang sangat berbeda ini mendominasi pendidikan di Amerika Serikat pada dekade 1920 sampai 40. Masa permulaan era modern ini diwarnai dengan relativitas (yang dipopulerkan oleh Albert Einstein). Jika pada jenis kurikulum sebelumnya faktor penentu kurikulum adalah disiplin akademis, fokus aliran progresifisme adalah anak. Dasar pemikiran aliran ini adalah bahwa anak mempunyai rasa ingin tahu, kebutuhan untuk ekspresi diri, dan dorongan belajar yang alamiah dan besar. Maka, perumus kurikulum akan memulai dari minat anak-anak dan memastikan isi kurikulum sudah sesuai dengan minat tersebut. Dalam implementasi

2 Bangsa Amerika juga sedang dalam masa pengukuhan jati diri mereka sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka. Satu abad setelah kemerdekaan, bangsa Amerika masih berjuang melepaskan pengaruh Eropa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan. Masih nampak adanya sikap ambivalensi terhadap pengaruh budaya Eropa. Universitas yang sekarang terkemuka seperti Harvard dan Yale pada saat itu masih merasa diri inferior terhadap Oxford, Sorbonne dan yang lainnya sehingga dalam bidang keilmuan Amerika masih banyak mengadopsi sistem Eropa dan pada saat bersamaan juga berusaha menata sistem mereka sendiri. Di lain pihak beberapa tokoh pemikir seperti Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau, dan Walt Whitman berupaya meningkatkan rasa kebangsaan Amerika dalam tulisan-tulisan mereka walaupun juga masih dipengaruhi oleh penyair dan penulis Inggris, Jerman, dan Prancis.

ekstrimnya, aliran ini tidak mengenal kurikulum yang sudah dibakukan/distandarkan karena kurikulum yang efektif harus sesuai dengan minat dan kebutuhan anak yang bisa bervariasi dari hari ke hari. Pelajaran seni mendapat porsi cukup besar karena menumbuhkan kreativitas anak dianggap sangat penting. Sebaliknya, matematika dan tata bahasa cenderung dikurangi porsinya. Berseberangan dengan progresifisme, fungsionalisme memulai kurikulum dari analisis mengenai fungsi-fungsi penting kehidupan sehari-hari seorang dewasa yang kemudian diterjemahkan dalam tugas-tugas pembelajaran. Kurikulum ini sejalan dengan teori manajemen scientifik Frederick Taylor dan didukung oleh teori stimulus-response Edward Thorndike.

Pasca Perang Dunia II, atau dalam pendidikan dikenal sebagai masa transisi, menggunakan kurikulum yang **konformisme developmentalis**. Dalam aliran ini, kurikulum bertujuan untuk mendukung status quo dengan menekankan pada pengetahuan dan ketrampilan praktis yang akan berguna secara langsung bagi siswa. Pakar yang berpengaruh pada pembentukan kurikulum ini adalah Ralph Tyler dan Havighurst. Dalam versi Havighurst, kurikulum disusun berdasarkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, kurikulum **strukturalisme ilmiah** menempati masa yang singkat namun sangat menarik dalam sejarah (1957-1967). Masa ini ditandai dengan gerakan perjuangan hak-hak sipil, feminisme, dan lingkungan hidup. Kurikulum yang dilaksanakan dalam masa ini banyak dipengaruhi oleh Jerome Bruner dan mengacu pada struktur disiplin ilmu. Dalam bentuk-bentuk kurikulum mandiri (*teacher-proof curricula*), siswa mempelajari prinsip-prinsip yang berdasarkan pada masing-masing disiplin ilmu, konsep-konsep dan proses pencarian tahu (*inquiry learning*).

Radikalisme romantis mewarnai masa-masa yang juga dicatat dalam sejarah sebagai penuh kekerasan. Pembunuhan Martin Luther King dan Robert Kennedy serta perang Vietnam menyertai masa yang dalam dunia pendidikan dikenal sebagai masa eksperimen dalam pengembangan sekolah dan program yang berpusat pada anak. Radikalisme romantis merupakan gerakan protes terhadap kurikulum terstruktur yang dianggap kurang manusiawi dan mengabaikan kepentingan anak didik. Pada masa ini banyak bermunculan sekolah-sekolah alternatif. Para pendidik dan pengikut aliran radikalisme romantis banyak dipengaruhi oleh ide-ide Carl Rogers, seorang konselor yang mengemukakan model pembelajaran empati dan pendampingan. Sementara di belahan dunia yang lain, gagasan-gagasan Paulo Freire dan Ivan Illich menimbulkan gaung dan sambutan cukup besar. Freire³

3 Pendidik asal Brasil ini menjadi profesor di Harvard ketika diasingkan dari negaranya sendiri. Dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed*, dia membandingkan dua sistem pembelajaran. Yang pertama dia ibaratkan seperti mendepositkan uang di bank. Sistem yang satu arah ini mengabaikan peranan siswa sebagai partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Sistem yang kedua adalah proses membangun makna yang dilakukan sendiri oleh siswa dengan pendampingan/fasilitasi guru. Secara garis besar dan sederhana, kedua sistem ini sebenarnya berdasarkan pada dua kelompok teori yang saling bertentangan mengenai proses belajar. Kelompok teori behaviorisme/empiris/nurturis (Aristoteles, Thorndike, Watson, Pavlov, dll) menganggap siswa sebagai kertas putih yang kosong (John Locke: *tabula rasa*) dan sangat ditentukan oleh

menegaskan bahwa pembelajar harus diperlakukan sebagai partisipan aktif dan pemikiran-pemikiran siswalah yang harus menjadi acuan dalam perumusan kurikulum.

Pada saat orang Amerika mulai jenuh dengan kekerasan dan eksperimentasi, gerakan yang juga disponsori oleh Ronald Reagan—*back to basics*—menelurkan kurikulum yang lebih tradisional dan ketat. Gerakan *back to basics* ini merupakan reaksi dari rasa ketertinggalan bangsa Amerika dari bangsa-bangsa lain dalam penguasaan ketrampilan-ketrampilan dasar (aritmatika, membaca, dan menulis). Aliran **konservatisme privatistik** ini juga disertai dengan naik daunnya kelompok-kelompok fundamentalis agama dalam arena politik.

Dalam kerangka teoritis yang dikemukakan Allan Glatthorn ketika menyoroti sejarah dan perkembangan kurikulum di Amerika Serikat seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, pendidikan ketrampilan hidup termasuk dalam aliran konformisme developmentalisme. Tidak ada satupun dari keenam aliran kurikulum dalam kerangka Glatthorn yang bisa dianggap sempurna. Masing-masing aliran muncul sebagai hasil interaksi manusia dengan jamannya. Menarik untuk disimak bahwa aliran konformisme developmentalisme muncul pada era sesudah Perang Dunia II atau masa transisi sedangkan kurikulum ketrampilan hidup ini muncul menjelang akhir abad 20 dan makin marak pada awal abad 21 ini. Belum ada yang berani mencuatkan istilah Perang Dunia III namun tahun-tahun terakhir abad 20 dan awal tahun 21 jelas dipenuhi dengan pertumpahan darah dan berbagai macam kekerasan dalam skala besar.

Ketika Indonesia akan atau mulai memasukkan kurikulum ketrampilan hidup ini dalam sistim pendidikan nasional, kita perlu menyambut baik niat positif untuk menyiapkan siswa agar bisa berfungsi dengan mandiri dalam masyarakat. Namun mengadopsi kurikulum tanpa syarat juga bukan tindakan yang bijaksana. Kita perlu melihat gambaran besar sistim pendidikan nasional di Indonesia. Secara implisit maupun eksplisit, pelaksanaan program-program pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh tujuan “untuk menyesuaikan diri dalam sistim.” Dalam kurikulum pendidikan dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, misalnya, tujuan instruksional umum (TIU) yang berbunyi “siswa mampu mengikuti/mencontoh berbagai perbuatan yang ada dalam kehidupan di lingkungannya (keluarga, sekolah, dan masyarakat)” diterjemahkan menjadi pokok bahasan “mengenal perilaku baik dan buruk serta akibatnya *sesuai dengan aturan yang berlaku* dalam kehidupan sehari-hari” (*Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar Tahun 1994*). Selanjutnya, tujuan instruksional umum dan pokok bahasan tersebut akan dijabarkan di ruang-ruang kelas dan dikondisikan sepanjang masa sekolah oleh guru dengan contoh-contoh perilaku baik dan buruk serta aturan-aturan main yang tidak boleh dilanggar menurut tafsir guru yang biasanya juga sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh status

lingkungan dan pengalaman empiris. Sebaliknya para konstruktivis/naturis (di antaranya Plato, Descartes, Piaget, Chomsky, dll) mempercayai adanya kemampuan alamiah yang lebih menentukan proses pembelajarannya daripada lingkungan.

quo (misalnya, mengenai ritual upacara bendera, seragam sekolah, dan sebagainya). Untuk pokok-pokok bahasan yang lain pun, tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum biasanya memakai kata-kata “mengetahui perlunya,” “menyebutkan,” “membiasakan,” “menyesuaikan,” “mengenal perilaku yang benar,” dan “mengikuti/mencontoh.” Tidak ada tujuan-tujuan yang berbunyi “memikirkan,” “mendiskusikan,” “mengembangkan,” “menilai,” apalagi “mempertanyakan,” “memperbaharui,” dan “menemukan.”

Dalam kurikulum ketrampilan hidup, tujuan-tujuan yang ditetapkan mungkin sudah satu dua tingkat lebih tinggi dari tujuan-tujuan paling rendah yang pernah ditetapkan dalam pendidikan nasional kita. Dalam pendidikan ketrampilan hidup, siswa diharapkan untuk “melakukan” dan “berfungsi” dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sementara tujuan-tujuan ini sudah cukup baik dan memang dibutuhkan untuk banyak siswa, kita perlu mengingat agar tujuan-tujuan ini ditetapkan sebagai suatu pencapaian minimal dan bukannya malah menjadi plafon kaca yang membatasi siswa-siswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Kurikulum pendidikan nasional juga perlu menentukan tujuan-tujuan yang lebih menantang seperti misalnya “mengembangkan,” “mempertanyakan,” “menilai,” atau bahkan “mencipta.” Jika kita tidak menetapkan tujuan yang setinggi ini sekarang, Indonesia tidak akan pernah melahirkan pemenang hadiah Nobel dari antara siswa-siswa yang patuh pada sistem.

Pola-pola pemikiran yang mengarahkan siswa untuk menyesuaikan diri dengan sistem dan makin memantapkan status quo ini juga berlanjut terus pada pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah dan tinggi. Paradigma developmentalisme makin mengkristal pada tingkat pendidikan tinggi dengan konsep kesepadanan dan keterpautan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Menyepadankan dunia pendidikan dan dunia kerja dan mengharapkan para lulusan perguruan tinggi akan menjadi “tenaga siap pakai” seakan-akan menyederhanakan permasalahan pendidikan dan kebudayaan dan mereduksi hakikat pendidikan itu sendiri dan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Konsep *link and match* yang dikemukakan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Wardiman Djojonegoro memang mengarah pada kebutuhan urgen dan realita sesaat, terutama di dunia industri. Namun upaya untuk mewujudkan kesejahteraan lebih tinggi melalui jalur pendidikan ini meninggalkan berbagai persoalan mendasar dalam bidang pendidikan yang masih perlu dipecahkan untuk mewujudkan pesan-pesan yang tercantum dalam UUD 1945 (“... mengupayakan kesejahteraan umum...” dan “...mencerdaskan kehidupan bangsa...”) yang masih belum tersentuh kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan.

Dominasi konformisme developmentalis dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Nasional menunjukkan hubungan sebab akibat yang timbal balik dengan ketidak-berdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Melalui proses-proses pembelajaran bertahun-tahun yang mengarahkan siswa untuk “mengikuti, mencontoh, membiasakan, dan menyesuaikan” dengan norma-norma yang sudah ditetapkan, penguasa berhasil “memproduksi” tenaga-tenaga siap pakai/jadi pelengkap pembangunan dan menciptakan konstruksi-konstruksi sosial yang makin

memantapkan status quo. Sebagai akibatnya, kebanyakan penduduk Indonesia ternyata bisa membiasakan dan menyesuaikan dengan kesewenang-wenangan dan penindasan yang berlangsung sampai dengan tiga dekade. Kebanyakan penduduk Indonesia juga bisa membiasakan dan menerima kerusuhan sosial dalam skala massal yang menimpa saudara-saudara mereka di banyak bagian di negara ini.

Sebaliknya, ketidak-berdayaan ini juga menjadi salah satu sebab utama kurang efektifnya banyak upaya reformasi di bidang pendidikan. Gejala apatisme nampaknya sudah melanda para *stakeholders* dunia pendidikan—siswa, orang tua, masyarakat, guru, dan administrators. Sebagai contoh, kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) mendapat acungan jempol ketika diujicobakan dalam proyek percontohan karena memang memuat banyak gagasan menarik mengenai partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Secara konseptual, kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif memang diharapkan bisa meningkatkan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun kemudian ketika diadopsi sebagai kurikulum nasional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), pekerja kurikulum di lapangan tidak mampu atau sudah enggan menerjemahkan dan merealisasikan konsep-konsep tersebut. Memang ada banyak variabel yang perlu kajian lebih lanjut dalam menilai efektifitas kurikulum CBSA. Sebagai salah satu variabel, ketidakmampuan dan keengganan para pekerja kurikulum juga merupakan cerminan dari sikap apatisme dan konformisme masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, sebegini besar para pekerja kurikulum ini juga merupakan produk sistem pembelajaran yang memperlakukan siswa sebagai obyek didik yang seolah-olah dapat dibentuk sekehendak pendidik dan dianggap mempunyai kemampuan yang sama dan secara lebih luas mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang sudah terlanjur konformis sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengubah paradigma dan melakukan transformasi pembelajaran sesuai dengan gagasan-gagasan dalam kurikulum CBSA. Banyak survey dan penelitian menunjukkan kebanyakan guru tidak bisa atau paling tidak sulit sekali melepaskan diri dari model pembelajaran yang pernah mereka sendiri terima dari guru mereka dulu.⁴

Pendidikan nasional suatu bangsa terjadi dalam suatu konteks dan proses yang kompleks. Ideologi yang mendasari suatu aliran kurikulum tertentu akan sangat menentukan perilaku masyarakatnya dan arah kemajuan (atau kemunduran) bangsa tersebut. Tapi aliran-aliran yang nampak dalam suatu bentuk kurikulum tertentu bisa juga merupakan akibat dari berbagai proses sosial yang terkait satu sama lain. Sebenarnya sah-sah saja memasukkan aspek-aspek fungsionalisme dan developmentalisme dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum karena toh para lulusan pendidikan juga harus memikirkan dan melakukan kontribusi terhadap masyarakat.

4 Evy Ridwan, Willy Renandya dan Anita Lie. "Reflective Teaching: A Survey of EFL Teachers in Indonesia." Makalah dipresentasikan di SEAMEO RELC, Singapura, 22-24 April 1996; Lieberman, A. April 1995. "Practices that support teacher development: Transforming conceptions of professional learning." *Phi Delta Kappan*, 76,8: 591-695; Stephens, D. dan K.M Reimer. (1995). "Explorations in reflective practice." Ed. Leslie Patterson. *Teachers are researchers: reflection and action*. Newark: International Reading Association.

Banyak tokoh masyarakat dan juga pendidik mengemukakan pentingnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja.⁵ Hanya saja gagasan relevansi ini jangan sampai melunturkan hakikat pendidikan yang sebenarnya dan mereduksi kreativitas potensial anak didik menjadi konformisme ala robot.

BIBLIOGRAFI

- Brolin, D. E., *Life Centered Career Education: A Competency Based Approach* (3rd ed.). Reston, VA: The Council for Exceptional Children, 1989.
- Eisner, E.W. dan E. Vallance, *Changing Conceptions of Curriculum*. Berkeley, CA: McCutchan, 1974.
- Glatthorn, Alan, *Curriculum Leadership*. Glenview, Il: Scott, Foresman and Co., 1987.
- Havighurst, R.J., *Developmental Tasks and Education* (edisi ke 3). New York: McKay, 1972.
- Lie, A., *Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang Kelas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.
- Lieberman, A., "Practices that support teacher development: Transforming conceptions of professional learning." *Phi Delta Kappan*, 76, 8: 591-695 (1995).
- Pongtuluran, A. dan A. Lie., "Indonesia: Review of Educational Events in 1995-1996," *Asia Pacific Journal of Education*, 18(1), 79-84, (1997).
- Ridwan, Evy, Willy Renandya dan Anita Lie., "Reflective Teaching: A Survey of EFL Teachers in Indonesia." Makalah dipresentasikan di SEAMEO RELC, Singapura, 22-24 April 1996.
- Stephens, D. dan K.M Reimer, "Explorations in reflective practice." Ed. Leslie Patterson, *Teachers are researchers: reflection and action*, Newark: International Reading Association, 1995.

5 Panji, 1999,<http://www.dikti.org>